

ANTHROPOS:
Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>



Menolak *Evasive Identity*: Memahami Dinamika Kelompok Etnik di Sumatera Utara

Erond L. Damanik

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Indonesia

Abstrak

Penyebutan Kelompok Etnik (*ethnic group*) di Sumatera Utara dikonstruksi dari luar (*outsider*). Konsep 'Batak' dan 'Melayu' adalah label yang diberikan dari luar dan menjadi identitas kabur (*evasive identity*) pada saat digunakan menyebut populasi yang dipersatukan dengan penyeragaman itu. Pengonstruksian dilakukan merujuk pada benteng alam, kultural dan agama, serta perubahan sosial yang mengitarinya. Walaupun penyeragaman itu telah ditolak, tetapi tetap muncul dalam berbagai literatur Ilmu Sosial. Kenyataan ini berdampak pada adanya kekeliruan terhadap kebenaran-kebenaran yang dianggap hakiki itu terutama pada dasawarsa kedua di Milenium ketiga. Sejumlah penelitian mutakhir, dengan berbagai bukti empirik menegaskan bahwa penyebutan kelompok etnik di Sumatera Utara berikut stigma yang dilekatkan padanya adalah konstruksi luar, *evasive identity* dan kini banyak ditolak.

Kata Kunci: Kelompok Etnik, Penyeragaman, *Evasive Identity*.

Abstract

The mention of ethnic groups in North Sumatra is constructed from outsider. The concepts 'Batak' and 'Malay' are labels that are given from the outside and become an evasive identity when used to refer to the population united with the union. The construction is done referring to the landscape, culture and religion, and the social changes that surround it. Although the uniformity has been rejected, it still appears in various Social Science literature. This fact has an impact on the mistakes of these ultimate truths, especially in the second decade of the third millennium. A number of recent studies, with various empirical evidence confirming that the mention of ethnic groups in North Sumatra following the stigma attached to them is outside construction, evasive identity and is now widely rejected.

Keywords: Ethnic Group, Uniformity, *Evasive Identity*.

How to Cite: Damanik, E.L. (2018), Menolak *Evasive Identity*: Memahami Dinamika Kelompok Etnik di Sumatera Utara. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4 (1): 9-22

*Corresponding author:

E-mail: eronddamanik@yahoo.com

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

PENDAHULUAN

Terdapat kekeliruan atau percisnya ketidaktepatan kategorisasi kelompok etnik di Sumatera Utara terutama menyoal '*Batak* dan *Melayu*'. Kedua konsep ini muncul bersamaan pada abad-15 pada tulisan-tulisan etnograf asing yang berkunjung ke Sumatra bagian utara. Untuk pertama sekali, konsep '*Batak*' (yang disebut *Bata*, *Battak*, *Battas*, *Batech*) muncul pada tulisan Pires (1940) maupun Pinto (1991) untuk menyebut masyarakat yang bermukim di pedalaman Aceh dan Sumatra Utara. Sedangkan '*Malay*' disebut Polo (1958) untuk menyebut masyarakat pemukim di pesisir pantai. Riwayat perjalanan etnograf asing ke Sumatra bagian utara telah dikompilasi Reid tahun 1995.

Ketidaktepatan itu menyangkut homogenisasi masyarakat pedalaman (*inland society*) menjadi satu kategori yang disebut '*Batak*' maupun kategorisasi masyarakat pesisir (*coastal society*) yang disebut '*Malay*'. Harus dipahami bahwa, kedua konsep itu tidak dimaksudkan menyebut kelompok etnik (*ethnic grup*) tetapi justru menunjuk pada karakteristik umum pemukim di pedalaman (*inland*) maupun di pesisir (*coastal*). Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah menyoal keanggotaan dan dasar kontruksi kedua kategori itu: siapakah sesungguhnya anggota masyarakat '*Batak dan Melayu*' itu, dan atas dasar apakah kedua kategorisasi ini dikonstruksi?. Bukankah konsep '*Batak dan Melayu*' adalah pelabelan yang kabur (*evasive identity*) pada saat dipergunakan menunjuk pada populasi yang diseragamkan pada kedua konsep itu?.

Satu hal lagi, merujuk pada Perret (2010), suatu kelompok masyarakat yang berada di pegunungan Bukit Barisan di utara Panyabungan Mandailing Natal, yang disebut dengan '*Orang Lubu*' atau '*orang Siladang*' tidak termasuk pada kedua kategori ini. Bahkan, dalam literatur Antropologi Indonesia termasuk di Sumatera Utara sendiri, keberadaan kelompok masyarakat ini jarang sekali disebutkan. *Padahal*, merujuk pada sumber Belanda seperti Kremer (1912) dan *Adatrechtbundel* (1919), masyarakat *Loeboes (Lubu)* bermukim di Padanglawas dan Mandailing. Pada tahun 1891, populasinya mencapai 2.033 jiwa. Pada tahun 1984 populasinya hanya 1.600 jiwa (Butar-butar, Abubakar dan Damanik, 1984)

sedang tahun 2008 populasinya mencapai 2.011 jiwa (Sinar dan Tou, 2008).

Di Sumatera Utara terdapat 8 kelompok etnik yakni Melayu, Simalungun, Toba, Mandailing, Angkola, Pakpak, Karo, dan Nias sebagai etnik tuan rumah (*host ethnic*). Kelompok etnik ini sudah bermukim di Sumatra Utara sebagaimana dicatat Marsden (2008) dan Anderson (1971) jauh sebelum periode kolonialisme. Sedangkan orang Jawa, Tionghoa, India, Arab, Aceh, Minangkabau dan lain-lain adalah masyarakat pendatang (*migrant ethnic*). Kedatangan kelompok ini ke Sumatera Utara, erat kaitannya dengan periode perkebunan milik kolonial sejak 17 Juli 1863 (Damanik, 2016; Pelzer, 1985; Breman, 1992, Stoler, 2006). Etnik '*Batak*' sebagaimana disebut Bangun (1980) disebut terdiri dari sub-etnik yakni Mandailing, Simalungun, Toba, Karo, Pakpak dan Angkola, sedangkan etnik Melayu adalah terutama orang Simalungun dan Karo yang menganut agama Islam (Perret, 2010). Belakangan, pada tahun 2004, Syamsul Arifin yang pada waktu itu menjabat Gubernur Sumatera Utara menetapkan '*etnik Pesisir Tapanuli Tengah*' sebagai etnik tuan rumah ke-9 di Sumatera Utara. Hingga kini nama '*Etnik Pesisir Tapanuli Tengah*' tidak tercatat dalam literatur antropologi Indonesia, tetapi penetapan itu adalah bentuk kontruksi yang bernada politik serta mengundang polemik. Siapa yang disebut dengan anggota etnik ini sungguh membingungkan, karena di dalamnya terdapat orang Toba, Nias, dan Minangkabau yang menyatu dan membentuk bahasa pesisir serta sejumlah atribut hasil dari proses akulturasi yang terjadi.

Kekeliruan lain menyoal tentang adanya konsep-konsep penyebutan masyarakat seperti: orang *Jehe* dan orang *Gugung* pada etnik Karo (Brahmoputro, 1980), orang *Jahe-jahe* atau orang *maya-maya* pada orang Simalungun (Damanik, 2017), ataupun orang *Padangbolak* di Mandailing, orang *Pardimbanan* di Asahan (Anderson, 1971), orang Silindung, orang Samosir dan orang Humbang di Toba (Meerwaldt, 1894; Marsden, 2008), orang *Boang* di Singkil pada etnik Aceh Singkil (Agustono, 2010; Damanik, 2016, Berutu, 1994). Meskipun memiliki perbedaan mencolok, tetapi literatur antropologi Indonesia '*kadung*' telah mencatat bahwa orang *Jehe* dan *Gugung* disatukan sebagai etnik Karo, orang *Jahe-jahe* atau *Maya-maya* dipersatukan sebagai etnik

Simalungun, orang *Padangbolak* disatukan menjadi etnik Mandailing, orang *Pardimbanan* dipersatukan menjadi etnik Melayu, orang *Silindung*, *Samosir* dan *Humbang* dipersatukan menjadi etnik Toba, orang *Boang* disebut menjadi etnik Aceh Singkil. Penggabungan etnisitas seperti ini didasarkan pada 'agama' dan 'kultur' yang baru terjadi pada periode kolonialisme (Joustra, 1909; 1910 dan Westenberg, 1891; 1897).

Demikian halnya penyeragaman etnik 'Melayu' di Sumatera Utara. Bila mendasarkan diri pada tulisan etnograf, maka sebenarnya konsep inipun tidak dimaksudkan sebagai penyebutan nama etnik, tetapi justru sebagai ciri khas masyarakat yang bermukim di pesisir (tepi pantai) dan sudah memeluk Islam. Karena itu, masyarakat di sepanjang pantai Lhokseumawe sebagaimana disebut Pires (1944) tahun 1515 adalah 'Melayu'. Hal sama disebut Polo tahun 1290-an bahwa pemukim di tepi pantai Sumatra bagian utara adalah 'Melayu'. Sejumlah penulis pada periode abad ke-13 hingga 19 masehi menyebut masyarakat pemukim di pesisir adalah 'Melayu', sedangkan di pegunungan adalah 'Batak' (Reid, 1995). Penulis seperti Sinar (1986; 2006) menyebut bahwa masyarakat di Langkat, Binjai, Deli, Serdang, Asahan, Batubara, Labuhanbatu bahkan di Riau adalah Melayu. Kenyataan sama dilakukan penulis Lah Husny (1978), Said (1961), Pelly (2015) dan lain-lain.

Penyeragaman sebagai 'Melayu' di Sumatera Utara memunculkan pertanyaan krusial tentang keterhubungannya dengan Melayu di Riau, Kalimantan, Sulawesi ataupun di Malaysia sekalipun. Di Kalimantan misalnya, mereka dapat mengidentifikasi *origin* (asal muasal) etniknya sebagai etnik Iban ataupun Banjar walaupun menyebut diri Melayu. Demikian halnya di Sulawesi dimana etnik Melayu disana dapat menyebut identifikasi *origin* etniknya seperti Mandar dan Bugis dan lain-lain. Melayu di Sumatera Utara tak ubahnya seperti Melayu di Riau ataupun Malaysia yang tidak dapat menunjuk *'origin'* etniknya.

Berangkat dari persoalan di atas, naskah ini ditulis sebagai cara menolak penyeragaman kelompok etnik di Sumatera Utara. Bagaimanapun juga, penyeragaman itu telah mengingkari keberagaman (kebhinekaan) etnik di Sumatera Utara apalagi dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian mutakhir. Karena itu, penyeragaman

etnik terutama 'Batak dan Melayu' adalah pelabelan dari luar sebagai identitas yang kabur (*evasive identity*). Demikian halnya dalam suasana desentralisasi dewasa ini, persoalan etnisitas tidak hanya terjadi di Sumatera Utara tetapi hampir seluruh Indonesia. *Alih-alih* menuntut *recognition*, tetapi kerap berbalut *interest* baik pada *election* maupun Pemekaran Daerah. Harus diakui bahwa penyeragaman itu tidak serta merta menjawab permasalahan tentang kelompok etnik (*ethnic group*) di wilayah yang *plurall and multicultural society* ini, tetapi justru membangkitkan suasana etnisitas yang dapat berujung *eksplosif*.

METODE PENELITIAN

Penulisan naskah ini didasarkan pada penelitian pada pembacaan ulang terhadap jurnal, tesis maupun disertasi yang menulis (mengkaji) tentang kelompok etnik di Sumatera Utara. Penulisan ini didorong adanya kenyataan di Sumatra Utara yang menolak disebut 'Batak' serta penarikan diri dari Melayu dengan merujuk *'origin'* etnik asalnya. Guna menuliskan tentang tema yang dianggap 'sensitif' tetapi krusial harus dijawab, maka dilakukan pembacaan ulang pada naskah-naskah yang dimiliki penulis berupa risalah perjalanan etnograf, jurnal, tesis maupun disertasi. Naskah-naskah itu adalah tulisan ataupun kajian yang didasarkan pada etnohistori, arkeologi, sejarah maupun antropologi. Dengan berbagai bukti-bukti empiris dan ilmiah, kemudian disusun sebuah naskah yang mencoba menguraikan munculnya homogenisasi etnik di Sumatra Utara.

Naskah utama dijadikan sebagai rujukan pada naskah ini berasal dari naskah kompilasi Reid (1995) memuat tentang seluruh catatan etnograf ke Sumatra bagian utara (Sumatra Utara dan Aceh). Demikian pula naskah ditulis Perret (2010), Miksic (1979) maupun McKinnon (1984) yang didasarkan pada temuan-temuan artefaktual arkeologis di Sumatra Timurlaut. Berikutnya terdapat naskah antropolog seperti Geertz (1963), Bruner (1961), Naroll (1964), Barth (1969), Nagata (1981) maupun Hirouse (2009). Karya sejarah dan agama seperti Pardede (1975), Castels (2002) maupun linguistik seperti Vorhoeve (1929; 1955) maupun Kozok (2009) turut diacu guna membentuk cara berfikir yang menolak penyeragaman kelompok etnik di Sumatera Utara ini. Naskah ini adalah salah satu bagian dari buku yang sudah penulis kerjakan

pada tahun 2017 khususnya dari Bab III dari keseluruhan naskah dengan judul: *Rumor Kanibal, Menolak Batak dan Jejak Perdagangan: Etnohistori Sumatra Bagian Utara*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah penulis tidak bisa melepaskan diri dari kontruksi kelompok etnik 'Batak dan Melayu' warisan etnograf dan kolonial. Sebut saja puluhan penulis dengan subjek '*Batak*' seperti Viner (1980), Smith dan Kipp (1983), Bruner (1961), Cunningham (1958), Castels (2002), Parkin (1978), Singarimbun (1975), Bruner (1961), Liddle (1970), Tarigan (1974; 1975), Simanjuntak (2002), Pedersen (1969), Oudemans (1973), Hasselgren (2008), Aritonang (1988), Clauss (1982), Hutauruk (1993), Jansen (2003), Penny (1964), Kozok (1999) dan lain-lain. Para penulis ini 'meniru' kebiasaan menulis para etnograf atau penulis terdahulu yang menyeragamkan '*Batak*' terutama Loeb (1981), Hutagalung (1991), Vergouwen (1986), dan Lumbantobing (1957). Kemudian, sejumlah penulis Toba mencoba merekonstruksi '*penyeragaman Batak*' seperti ditulis Hutagalung (1991) yang diterbitkan pertama sekali tahun 1926 serta diulang Vergouwen (1986) yang diterbitkan tahun 1935. Para penulis seperti ini adalah seperti Lumbantobing (1957) pada saat menulis tentang *Sisingamangaraja I-XII*, Gultom (1992) saat menulis tentang *Dalihan Na Tolu*, Situmorang (2004) pada saat menulis *Toba Na Sae*, Sijabat (1982) pada saat menulis *Sisingamangaraja*, Simanjuntak (1977) pada saat menulis *Sejarah Batak*, Siahaan (1964) saat menulis *Sedjarah Kebudayaan Batak* maupun Harahap (1960) yang menulis *Perihal Bangso Batak*, dan lain-lain. Tampaknya mereka ini sepertinya sudah terdoktrin bahwa '*Batak*' adalah seragam seperti sediakala ditulis.

Mereka ini mengabaikan perbedaan-perbedaan antar etnik '*Batak*' seperti ditulis Marsden (2008) yang terbit pertama kali tahun 1778 ataupun Anderson (1971) yang terbit pertama kali tahun 1826. Mereka juga mengabaikan tulisan Viner (1980) ataupun Vorhoove (1929; 1955) yang membedakan 'etnik Batak' dari segi lingustik maupun organisasi sosialnya. Mereka juga mengabaikan tulisan Pires (1944) yang menyebut bahwa 'Tanah Batak' tahun 1515 berada pantai timur Sumatra bagian utara diantara *Aru* (Medan) dan Lhokseumawe, atau juga

tulisan Pinto (1991) yang menyebut bahwa 'Tanah Batak' tahun 1539 berada di pantai Barat Sumatra bagian utara dengan ibukota *Panaju*. Bahkan, 'Tanah Batak' pernah mencakup wilayah Labuhanbatu, Kisaran dan Asahan seperti tampak pada peta Barned (1912). 'Tanah Batak' sebagai suatu daerah administratif, baru terbentuk pada tahun 1842 ketika dibentuk *afdeeling Bataklanden* pada Gubernurnemen Sumatra Barat dengan ibukota Padang. Kemudian, sejak tahun 1887 dibentuk *afdeeling Bataklanden* dan menjadi salah satu wilayah di Karasidenan Tapanuli yang dibentuk tahun 1915 (Castels, 2002).

Barangkali, yang ingin dicapai adalah membentuk '*Batak diaspora*' seperti dilakukan Hutagalung (1991) tahun 1926 yang kemudian diikuti Vergouwen (1986) tahun 1935. Hutagalung adalah penulis bombastis. Dalam karyanya berjudul: *Pustaka Tarombo dohot Turi-turian ni Bangso Batak*, ia menyebut bahwa muasal orang 'Batak' berasal dari Pusuk Buhit yang berdiaspora hingga ke Simalungun, Mandailing, Karo, Pakpak, Angkola bahkan ke Gayo serta Nias. Di katakan juga bahwa, pada saat *Siraja Batak* dilahirkan, lalu membentuk pemukiman awal di Sianjur Mula-mula (Situmorang, 2004). Namun, hasil ekskavasi di kampung dimaksud, pentarikan yang diperoleh berdasarkan *carbon dating* merujuk pada angka tahun 600 (+400) tahun yang lalu. Artinya, kampung dimaksud baru dihuni sejak abad 16 dan paling lama pada abad 11 masehi (Wiradyana, 2014).

Tampaknya, pola penulisan demikian membuat Bangun (1980) menyebut bahwa 'Batak' adalah etnik sedangkan 6 kelompok yang diseragamkan itu disebut sub-etnik. Sebagai catatan bahwa, dalam literatur antropologi tidak dikenal istilah 'sub-etnik' (sub-suku) melainkan hanya 'etnik' (suku). Sumber seperti Bangun (1980) ini kemudian di edit Koenjtaraningrat (1980) dalam bukunya *Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Buku ini, menjadi semacam landasan hukum yuridis bahwa 'Etnik Batak' di Sumatera Utara terdiri dari subetnik yang dipersamakan itu. Sebenarnya, konsep '*Batak*' pada sumber-sumber etnograf itu tidak merujuk pada nama etnik tetapi justru pada karakter masyarakat yang disebut belum beragama atau pagan dan cenderung bermukim di pedalaman (*inland*).

Penulis seperti Reid (2009) telah menyebut bahwa sejak tahun 1926, orang Toba melakukan 'pembatakan diri' dan bangga dengan sebutan itu. Pendapat Reid (2009) ini sejalan dengan pernyataan Pardede (1975) yang menyebut bahwa 'Tanah Batak' dan 'Orang Batak' adalah ciptaan orang asing (*die Begriffe Batakland und Batakvolk wurden von Auslander gepraght*). Perbedaan mencolok ke-enam etnik yang diseragamkan dalam label 'Batak' seperti disebut Viner (1980) tampak pada bahasa ataupun dialek serta struktur sosialnya. Viner (1980) menyebut: *these different Batak peoples speak closely related languages that can be arranged into two mutually unintelligible groupings*. Struktur sosialnya didasarkan pada patrilineal dengan *cross-cousin marriage* dimana setiap individu mengkategorikan diri terhadap *agnates* seperti *wife-givers* maupun *wife receivers*.

Menyoal bahasa misalnya, Vorhoeve (1929; 1955) telah menyebut perbedaan diantara 6 (enam) etnik 'Batak' yang terbagi dalam: bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Toba, bahasa Angkola, bahasa Mandailing dan bahasa Timur (Simalungun). Bahasa-bahasa ini menurut Vorhoeve (1929; 1955) dibagi ke dalam kelompok utara yakni Karo, Alas, Pakpak dengan subdialek Kelasén, Simsim, Pegagan dan Boang; kelompok selatan terdiri dari Toba, Angkola dan Mandailing, dan kelompok tengah terdiri dari bahasa Simalungun. Kemudian, dari pengelompokan ini, dibentuk tiga kelompok bahasa utama, yakni bahasa kelompok selatan yang terdiri dari Mandailing, Angkola dan Toba, bahasa Pakpak dan Karo di utara dan bahasa Simalungun di Timurlaut.

Menyoal penampilan fisik, pakaian dan adat istiadat, Anderson (1971) pada kunjungannya tahun 1823 menyebut terdapat perbedaan mencolok pada orang Karo, Simalungun, Toba dan Melayu. Demikian pula Loeb (1991) membedakan warna nasional Karo yakni biru dan warna nasional Toba yakni coklat. Perbedaan lainnya tampak pada 'agama' yang masing-masing etnik memiliki sistem kepercayaan khusus dan tersendiri. Perret (2010) juga menyebut bahwa penelitian pada manuskrip-manuskrip kuno diantara etnik 'Batak' itu tidak pernah menuliskan atau mencatatkan konsep 'Batak'. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya konsep itu adalah diberikan orang lain yaitu para etnograf yang memotret masyarakat Sumatra bagian utara

dari langit. Lebih lanjut, merujuk Castels (2001), selain Simalungun maka tak satupun diantara kelompok etnik yang diseragamkan dengan 'Batak' itu memiliki sistem organisasi sosial politik bernegara bercorak monarhis (*stateless*). Selanjutnya, Kipp (1983) menyebut bahwa setiap etnik 'Batak' yang diseragamkan itu memiliki keunikan tersendiri:

each Batak society has a unique shape. Toba keep extended written genealogies and erect ostentations monument to their ancestors. In contrast, Karo emphasize affinity, the dominance-subordination of the wife givers/wife receiver relationships, and seldom know their ancestors beyond three or four generations. In between these, apperently in social structure as well as geography, lie the Pakpak.

Diantara kedua kecenderungan ini, etnik Pakpak lebih mengedepankan geografisnya (teritorial) disebut dengan *suak* (subkultur) yakni kesatuan teritorial berdasarkan lima sub-etnik Pakpak (*Pakpak silima suak*) dan kurang memperdulikan ansestornya. Etnik Simalungun cenderung menekankan pada kesatuan teritorial marga dan kurang memperhatikan *ancestor*-nya. Sama halnya dengan Mandailing yang menjadikan marga (*clan*) sebagai basis interaksi dan perkawinannya, tetapi tidak memperdulikan *ancestor*-nya. Perbedaan lain tampak pada sistem marga (klan) yang jauh lebih rumit pada etnik Toba dibanding Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Angkola. Selain itu, perbedaan lain yang lebih mencolok tampak seperti penggambaran sikap yang dilakukan Joustra (1910) sebagai berikut:

Orang Karo mempunyai sikap dan cara berbicara yang lebih tenang, lebih halus daripada orang Toba. Meskipun orang Karo bisa cepat menjadi agresif juga, tetapi ia lebih dapat menahan diri. Ia kurang berani dan terutama jauh lebih rajin [...] Mereka (orang Simalungun) lebih tenang dalam berbicara dan bertindak dibandingkan dengan orang Toba yang lebih kasar [...]. Berbeda dengan orang Karo, Angkola dan Mandailing, orang Toba tidak dapat menahan diri. Akan tetapi, berbeda dari kelompok lain dari segi sifat berprakarsa dan semangat yang menyala-nyala. Perlu dicatat juga bahwa mereka haus belajar.

Demikian halnya Melayu Sumatera Utara. Siapakah keanggotaan etnik Melayu itu?. Walaupun mereka menyebut satu kaum misalnya, tetapi orang

Melayu di Deli tidak mau dipersamakan dengan Melayu Langkat, Serdang, Batubara, Asahan maupun Labuhanbatu. Demikian sebaliknya. Tentu saja, penolakan akan muncul apabila Melayu Sumatera Utara dipersamakan dengan Melayu Riau, Melayu Bugis, Melayu Iban apalagi Melayu Malaysia. Sebenarnya, mereka ini cukup berbeda dalam hal batasan objektif seperti disebut Royce (1983). Demikian pula mereka berbeda secara subjektif seperti penolakan Melayu Deli yang dipersamakan dengan Melayu Langkat itu.

Sejumlah penelitian terbaru sudah mencoba menolak penyebutan 'Melayu' sebagai etnik. Sejumlah penulis dapat disebut seperti Miksic (1979), McKinnon (1984), Milner (1978), Reid (1979), maupun Langenberg (1977) dan lain-lain. Bahkan, Perret (2010) secara tegas menyebut bahwa orang Melayu di Deli dan Langkat adalah orang Karo yang masuk Islam. Kenyataan ini tampak pada Guru Patimpus (didaulat sebagai pembuka Kampung Medan), *Datuk* Sunggal klan Surbakti, *Datuk* Brayon (klan Surbakti), *Datuk* Denai, *Datuk* Senembah, *Datuk* Kota Bangun dan lain-lain yang semuanya adalah orang Karo. Demikian pula nama-nama kampung di Deli cenderung menunjukkan penyebutan *ala* Karo seperti Sukapiring, Sepuluhdua Kuta, Sunggal, Magosta, dan lain-lain.

Demikian halnya orang Melayu di Serdang berasal dari orang Simalungun dan Karo yang masuk Islam. Sejarah Serdang sebagaimana disebut Sinar (1981) tidak bisa lepas dari Simalungun yang berada di Dolog Silau. Selanjutnya, orang Melayu di Serdang Bedagei, Tebingtinggi, Batubara dan Asahan adalah orang Simalungun yang masuk Islam. Tebingtinggi misalnya, adalah sebuah wilayah yang dibuka pertama kali oleh Tuan Bandar Kajum Damanik, yang saat ini didaulat sebagai nama terminal di kota itu. Demikian pula banyak nama desa di Bedagei, Tebingtinggi hingga Asahan masih mencerminkan kental penamaan versi orang Simalungun. Bila cara berfikir Perret (2010) ini dilanjutkan maka orang Melayu di Labuhanbatu adalah orang Padangbolak yang memasuki kawasan itu sebelum masuknya Islam dan pra-kolonialisme.

Jika demikian, maka 'Melayu' di Sumatera Timurlaut sebagaimana disebut Perret (2010) adalah percampuran etnik asli (*origin*) seperti Karo dan Simalungun dengan budaya luar yang dibawa

pedagang asing (*foreign traders*) yang beragama Islam di daerah pesisir. Daerah-daerah pertemuan ini disebut '*pertumbuhan*' (tempat ramai untuk berdagang dalam bahasa Karo) ataupun '*bandar*' (tempat ramai untuk berdagang secara terus menerus dalam bahasa Simalungun) adalah kawasan kosmopolit yang mengubah identitas asal ke suatu identitas baru yakni Melayu untuk menyatakan perbedaan diri dengan etnik asal sebelumnya.

Bila merujuk Perret (2010) disebut bahwa Islamisasi berlangsung setidaknya sejak abad ke-15, dan hubungan dengan tempat perdagangan lain di Semenanjung Melayu serta di bagian barat Nusantara, mempercepat sebuah ruang budaya di pesisir Timur yang mungkin berkembang dari sebuah kelompok kecil pendatang dari berbagai wilayah asal. Dalam ruang ini, setiap orang menjadi bagian dari sebuah ruang besar budaya Melayu yang bertumpu pada agama Islam, bahasa Melayu dan adat yang sama. Kelebihan menganut identitas baru ini bagi penduduk asli yaitu memperoleh kesempatan mengolah tanah di negeri-negeri pesisir dan berperan sebagai perantara (*broker*) antara penduduk pedalaman dan pedagang asing.

Pada era kolonialisme, Belanda memperkenalkan batas-batas kewilayahan (administrasi) yang menurut Joustra (1909; 1910) maupun Westenberg (1891; 1897), Kroesen (1897) maupun Perret (2010) dibentuk melalui benteng alam dan benteng budaya serta agama. Menurut Perret (2010) pembentukan batas etnik dan batas administrasi dilakukan pada dua tahap: i) menetapkan wilayah koloni berdasarkan *topografi* (pegunungan), *sejarah* (gagasan tersingkirnya masyarakat ke pedalaman) dan *politik* (daerah-daerah merdeka yang belum terpengaruh), dan ii) memberikan isi (*content*) pada tipologi masyarakat yang dibentuk sekaligus menjadi dasar kebersatuan masyarakat. Pada tahap ini, secara tekun dicari ciri-ciri yang sama pada masing-masing area, kemudian secara implisit dipandang sebagai ekspresi kesadaran pemersatu yang mendasar.

Pembentukan daerah administrasi ini erat kaitannya dalam upaya mengontrol masyarakat. Di tempat-tempat administrasi yang dibentuk itu, ditempatkan struktur pemerintahan baru seperti *controleur*, asisten residen hingga residen. Disana ditempatkan pula garnizum militer serta polisi guna 'memaksa' *natives* tunduk pada aturan

Pemerintah Kolonial. Singkatnya, konstruksi 'kelompok masyarakat' yang dalam konsepnya lebih tepat disebut daripada 'kelompok etnik'. Hal ini karena secara nyata, 'Kelompok Masyarakat Pedalaman' terdiri dari beberapa kelompok etnik seperti Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo dan Pakpak. Sedangkan 'Kelompok Masyarakat Pesisir' yakni Melayu juga kurang tepat, karena Orang Karo di Langkat, Binjai dan Medan dikategorikan sebagai Melayu karena menganut Islam. Demikian pula orang Simalungun di Lima Puluh, Tebing Tinggi maupun Pagurawan disebut Melayu karena menganut agama Islam. Konstruksi kelompok etnis, yakni 'Batak dan Melayu' didasarkan pada peta wilayah kolonial dengan mengacu pada topografi, sejarah dan politik berikut isi (*content*) pada satuan 'kelompok masyarakat' yang dibentuk. Namun demikian, penyeragaman itu tidak serta merta menjawab permasalahan tentang kelompok etnik (*ethnic group*) di wilayah yang *plurall and multicultural society* ini. Sebagaimana diakui Perret (2010) bahwa, sesungguhnya pembentukan ini mengabaikan ciri-ciri khusus ataupun perbedaan dari setiap kelompok etnik yang digabung atau dibelah menjadi satu kelompok administratif.

Jika merujuk batasan kelompok etnik seperti dilakukan Koentjaraningrat (1999) maka kelompok etnik adalah golongan manusia yang terikat kesadaran dan identitas akan entitas kebudayaan sedang kesadaran dan identitas itu (tidak selalu) dikuatkan oleh bahasa'. Lebih lanjut, Naroll (1964) mendefinisikan kelompok etnik sebagai:

is largely biologically self perpetuating, ii) share fundamental culture values, realized in overt unity in cultural forms, iii) make up a field of communication and interaction, and iv) has a membership which identifies It self and is identified by others, as constituting a category distinguishable from other categories of the same order

Menurut Barth (1969), rumusan kelompok etnik seperti disebut Naroll (1964) diatas telah mendekati kondisi umum ethnografi yang empiris dan umum. Namun demikian, rumusan dimaksud mengabaikan faktor-faktor empiris tentang konstruksi kelompok etnik guna menjelaskan asal usul, struktur dan fungsi kelompok etnik. Karena itu, menurut Barth (1969) kelompok etnik dapat dikenali sebagai unit kebudayaan dan tatanan

sosial. Sebagai unit kebudayaan, kelompok etnik dapat diamati dari: i) kelangsungan unit budaya, dan ii) adanya faktor yang mempengaruhi terbentuknya unit budaya. Sebaliknya, sebagai sebuah tatanan, kelompok etnik menunjukkan adanya kekhasan kelompok bersifat askriptif (*given*) yang dapat diperkirakan dari latar belakang asal usulnya.

Kenyataan di Sumatera Utara seperti disebut Perret (2010) misalnya, apabila menjelaskan kesadaran etnik (*ethnic consciousness*) hanya dengan mengajukan sekumpulan ciri-ciri yang sama, kenyataannya tidaklah menyakinkan. Keragu-raguan mengenai adanya ciri-ciri yang pernah dianggap sebagai ciri-ciri bersama antara populasi-populasi di pedalaman Sumatra bagian utara, masih ditambah lagi dengan petunjuk-petunjuk lain yang muncul dari sumber-sumber lokal. Atas dasar ini, ide kebersatuan politik populasi-populasi di pedalaman yang diganti dengan sebuah peta yang menunjukkan banyak 'puak' yang hidup berdampingan secara otonom. Mosaik politik itu masih harus ditambah dengan keragaman ekonomi. Bahkan prinsip yang dianggap sebagai mendasar 'Tanah Batak' yaitu *Dalihan na Tolu*, yang bertumpu pada ikatan-ikatan khusus antara *marga* seorang, *marga* pemberi dan *marga* penerima perempuan, juga menyimpan sejumlah pengecualian. Kenyataannya, memang di satu sisi terdapat *marga-marga* yang endogam, sementara di sisi lain orang Melayu ikut terlibat dalam upacara-upacara adat di wilayah Simalungun di Serdang dan Bedagei. Damanik (2017) telah menunjukkan bahwa struktur sosial orang Simalungun bukan bersifat segitiga (*Dalihan Na Tolu*) tetapi berbentuk segilima (*Pentagon*).

Kelompok etnik terbentuk bila seseorang menggunakan identitas etniknya guna mengkategorikan diri dengan orang lain dengan tujuan interaksi. Dalam hal ini dibutuhkan kesamaan tanda. Kesamaan tanda sangat dibutuhkan dalam interaksi karena adanya ketergantungan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang berinteraksi. Kesamaan tanda ini menunjukkan karakteristik budaya yang menandakan sebuah kelompok etnik dapat berubah. Demikian pula sifat budaya dan anggota dapat berubah bentuk bahkan tatanan kelompok sosial dapat berubah; tetapi kenyataan adanya dikotomi melanjut dari para anggota kelompok dengan orang lain

memungkinkan menentukan sifat menetap dan dari sanalah investigasi dilakukan. Karena itu, kelompok etnik dapat dikenali sepanjang menunjukkan perbedaan dengan kelompok lain. Perbedaan itu tentu saja tidak hanya mencakup batasan objektif maupun subjektif, tetapi lebih kepada memadukannya dengan dinamika sosial budaya yang dipastikan memengaruhi batasan objektif dan subjektif.

Seperti disebut Perret (2010) pada zaman prakolonial, sebutan 'Batak' sebenarnya tidak ada dalam sumber-sumber di pedalaman. Selain itu, beberapa pengamatan langsung yang dilakukan oleh orang Barat pada akhir abad ke-19, dan awal abad ke-20, menunjukkan bahwa ketika kategori 'Batak' digunakan di daerah pedalaman, sebutan itu menunjuk 'orang yang lain' dan tidak pernah digunakan untuk menunjuk diri atau puaknya sendiri. Karena itu, istilah 'Batak' adalah 'identitas kabur' (*evasive identity*) untuk menggambarkannya. Konsep 'Batak' juga tampak sebagai upaya kategori umum untuk menunjuk kebiadaban (*savage*), baik penduduk asli maupun orang yang berasal dari wilayah lain di Nusantara.

Pengaruh Aceh menurut Perret (2010) berupa pengambilalihan Pesisir Timur Sumatra bagian utara sejak abad ke-16 dalam ruang politik dan budayanya dimana Aceh sebagai pusatnya. Hingga abad ke-18, Pesisir Timur memegang peran perantara untuk memasok hasil hutan, kuda, dan beras dari pedalaman kepada pedagang asing. Peredaran mata uang dollar Spanyol di pertengahan abad ke-18, menunjukkan Pesisir Timur menjadi ruang moneter internasional. Jelas sekali bahwa Pesisir Timur bukanlah wilayah yang terisolasi karena jejaring pertukaran itu terjadi dua arah, karena orang pesisir juga memasuki pedalaman, sama seperti pedalaman mengunjungi pesisir. Selanjutnya, Sumatra bagian utara menjadi daerah menonjol sejak pertengahan abad ke-19. Daerah ini mengalami surplus lada sehingga mendorong Aceh mengokupasi wilayah ini dengan membentuk kesultanan guna mengembangkan 'ruang budi daya'. Perkembangan pesat perkebunan lada, gambir dan kapas pada abad itu, mengakibatkan guncangan sistem ikatan yang sebelumnya menghubungkan pesisir dan pedalaman.

Etnisitas (*ethnicity*) dapat dilihat berdasarkan tiga perspektif utama: i) primordial

(*primordialism*), ii) konstruktif (*constructivism*), serta iii) kombinatif (*combinativism*). Hal pokok mendasari perdebatan teoritis memandang etnisitas terletak pada tiga aspek, yaitu: *pertama* paradigma (perspektif) memandang etnisitas, *kedua* pemisahan kedua paradigma memandang fenomena dan realitas etnisitas, dan *ketiga* memandang etnisitas sebagai satu variabel dan tidak terkait dengan variabel lain. Penulis seperti Glazer dan Moynihan (1963) memandang etnisitas sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) berbeda dengan Royce (1982) yang memandang identitas etnik sebagai strategi adaptasi (*strategic adaptation*) dalam masyarakat majemuk, ataupun Geertz (1961) yang memandang etnisitas sebagai kelompok yang terikat primordialisme (*primordial ties*). Berbeda pula dengan Hale (2005) yang memandang etnisitas sebagai alat (*tools*) terutama untuk mobilisasi ataupun de Voss dan Romanucci (1967) yang memandang etnisitas sebagai kesinambungan budaya akibat perubahan.

Namun demikian, kelompok etnik sebagaimana disebut Smith (1982) paling tidak memiliki 6 kekhususan pokok yaitu: i) *a common proper name*, ii) *a myth of common ancestry*, iii) *a shares historical memories*, iv) *one or more elements common culture*, v) *a link with homeland* dan vi) *a sense of solidarity*. Ciri-ciri kelompok etnik seperti disebut Smith (1982) ini sejalan dengan karakteristik kelompok etnik seperti disebut *Simposium Dewan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (SSRC)* pada tahun 1973, yaitu:

a past oriented group identification emphasizing distinctives, ii) some culture conception and social categories, iii) relationship of the ethnic group to a component units in a broader system of social relation, iv) the fact that ethnic group are larger than kin or locality groups and transcend face to face interaction, v) different meaning for ethnic categories both in different social setting and different individual, and vi) the assumption for ethnic group categories are emblematics having name with meaning both or members and analyst.

Ketiga paradigma etnisitas di atas, selalu mengaitkan suatu keterkaitan kelompok etnik dengan atribut objektif atau ciri-ciri khusus yang dapat di demonstrasikan. Namun, sebagaimana telah ditunjukkan di atas bahwa penjelasan tentang kelompok etnik yang didasarkan pada ciri-ciri kekhususan itu saja akan menutup ruang dinamika

kebudayaan dan sosial disekitarnya. Jadi, ciri-ciri khusus sebuah kelompok etnik berdasarkan ikatan primordial harus ditambahkan dengan ciri-ciri subjektif yang mendasari perubahan sosial dan kulturalnya. Pada bagian ini, adalah benar apa yang disampaikan Barth (1969) bahwa etnik Patan di Thailand dapat membelah dua sebagai upaya menegaskan perbedaan mereka secara agama, walaupun akar etniknya tetap satu yakni etnik Patan. Demikian pula apa yang disampaikan de Voss dan Romanucci (1967) bahwa perubahan sosial kultural senantiasa memengaruhi kelompok etnik untuk menjaga keberlangsungan dari identitas kelompok etnik itu. Jadi, konsep 'Batak dan Melayu' yang dikonstruksi dari luar inipun memiliki makna yang sama bahwa sesungguhnya pengontruksian itu dilakukan semata-mata hanya untuk mengkategorikan karakteristik masyarakat di pedalaman dan pesisir tetapi tidak menyebut kelompok etnik.

Seperti disebut Perret (2010) bahwa '*perasaan menjadi bagian dari*' ataupun Castels (2002) bahwa kesadaran menjadi '*keluarga besar Batak*' ataupun, Reid (2011) bahwa '*kolonialisme memecah etnik*' maupun Geertz (1963) bahwa '*kolonialisme mempolarisasi etnik*' secara primordial baru terjadi sejak periode kolonialisme. Perasaan-perasaan 'menjadi bagian', atau 'keluarga besar Batak' yang dipecah menjadi 'etnik' sehingga 'terpolarisasi' (segmentatif) dimaksudkan Pemerintah Kolonial guna memudahkan kontrol, pengawasan ataupun penaklukan masyarakat yang disebut 'Negara Kolonial' (*colonial state*) yakni *Netherland India*. Pembentukan daerah administrasi di era Kolonial Belanda mengingkari batas-batas teritorial etnik, sehingga terjadi pengecilan wilayah budaya (*cultural region*) menjadi wilayah administratif (*administrative region*).

Wilayah administrasi Simalungun seperti disebut Damanik (2018) bahwa Kabupaten Simalungun dewasa ini jauh lebih kecil dari wilayah budaya Simalungun itu sendiri. Wilayah yang seharusnya menjadi administrasi Simalungun di Serdang, Bedagei, Tebingtinggi, Batubara, Asahan dan Karo dilepas dari Simalungun karena pengaruh benteng alam dan kultural. Tersebut diantaranya seperti Sipituhuta digabung ke Karo, Sipispis dan Dologmarlawan dan lain-lain ke Bedagei, Bangunpurba dan lain-lain ke Serdang, Limapuluh

dan Indrapura ke Batubara, Tanjungkasau, Pagurawan dan Pasir Mandogei ke Asahan ataupun Tebingtinggi yang dibentuk menjadi daerah tersendiri. Hal yang sama dialami etnik Pakpak dengan lepasnya *suak* Boang ke Aceh Selatan, maupun *suak* Kelasien ke Humbanghasundutan (Damanik, 2016; Agustono 2007). Demikian halnya etnik Karo seperti dilepasnya Sibolangit, Hampanan Perak, Senembah dan lain-lain ke Deli Serdang, ataupun Tanah Pinem dan Gunung Sitember ke Kabupaten Dairi. Kenyataan seperti ini terjadi sejak tahun 1906 dikala Westenbergh (1892;1897) dan Joustra (1910) merumuskan batas-batas kewilayahan berdasarkan benteng alam maupun kultural di Karo dan Simalungun. Di Simalungun terutama di daerah Asahan misalnya, penentuan batas-batas administratif itu merujuk pada tulisan Kroesen (1897).

Namun demikian, ruang-ruang geopolitik yang diciptakan era kolonial ini tidak bertahan lama. Meskipun tidak merubah batasan administratif, tetapi gugatan terhadap 'Batak dan Melayu' terus mengemuka sejak dasawarsa kedua abad 20. Misalnya pertikaian atau permusuhan antara orang Mandailing yang menolak 'Batak' dengan orang Angkola yang menerima 'Batak'. Walaupun keduanya sama-sama penganut Islam, tetapi keduanya bersitegang sepanjang tahun 1922-1925 menyoal pekuburan Islam Sei Mati (Pelly, 2015). Perlu dicatat bahwa etnik lain seperti Simalungun, Toba, Karo dan Pakpak tidak terlibat dalam konflik itu. Konflik ini berujung pada disharmoni diantara keduanya yang berujung pada pemisahan pekerjaan, bank, klub sepakbola, koran, tukang jahit dan lain-lain.

Pada tahun 1915-1918 seperti dicatat Dasuha dan Sinaga (2003) maupun Damanik (2017) terjadi konflik antara orang Simalungun dan Toba di Simalungun. Pendatang Toba di Simalungun menolak dimasukkan menjadi kawula *zelfbestur* (swapraja) Simalungun. Konflik ini baru selesai tahun 1918, ketika Belanda memaksa orang Toba harus tunduk pada raja-raja Simalungun jika ingin bertahan di persawahan Simalungun. Demikian halnya pada tahun 1947 di Tanah Pinem seperti disebut Castels (2002) terjadi konflik antara orang Pakpak yang berkoalisi dengan orang Karo menolak kehadiran orang Toba di Tanah Pinem dan Gunung Sitember. Konflik dengan orang Karo dapat diredam setelah pembentukan institusi gereja

sukunya. Namun berbeda dengan orang Pakpak yang terus berkonflik hingga tahun 1964. 'Perdamaian' orang Toba dengan Pakpak tampak selesai tahun 1992 ketika institusi GKPPD memperoleh kemerdekaannya dari dominasi HKBP. Demikian pula perjuangan mereka membentuk satu wilayah tersendiri atas nama etniknya baru terjadi di era Reformasi (Damanik, 2016). Orang Pakpak Dairi yang menurut catatan Marsden (2008) tahun 1774 disebut dengan *Papak Deira* harus kehilangan dua wilayahnya yakni *Boang* yang digabung ke Aceh Singkil tahun 1906 dan *Kelasen* ke Humbang Hasundutan sejak 1907 (Damanik, 2016; Agustono, 2007).

Orang Melayu di Asahan pada era Reformasi menarik diri dari ke-Melayu-annya, suatu identitas yang diterimanya sejak era kolonial. Orang Melayu di Asahan bergerak keluar dengan menunjuk identitas asal usulnya yakni Toba dan Simalungun. Itulah sebabnya, sebagian besar populasi di Asahan yang dalam tulisan Anderson (1971) disebut '*Pardimbanan*' itu adalah orang *Tubba* (Toba) dan *Semilongan* (Simalungun) dari *Kataran* (Timur dalam bahasa Simalungun) yang berpindah dari agama sukunya menjadi penganut Islam (Kroesen, 1897). Demikian halnya dengan orang Melayu di Bedagei, Serdang dan Batubara yang menarik dari Melayu. Banyak diantara populasi di wilayah ini menunjuk identitas asalnya yakni Simalungun dan Karo. Membandingkan fenomena ini dengan catatan Anderson (1971) pada kunjungannya tahun 1823 itu, bahwa populasi di ketiga daerah ini adalah orang *Semilongan* (Simalungun) dan *Karau-karau* (Karo) yang sudah beragama Islam.

Di Deli juga demikian. Penduduk Deli di Brayan, Klumpang, Sunggal, Klambir, Buluhcina, Denai, dan lain-lain sebagaimana disebut Anderson (1971) adalah orang *Karau-karau*. Sama halnya di Binjai dan Langkat dimana populasi yang terbanyak ditemui Anderson adalah *Karau-karau*. Mereka ini seperti disebut Perret (2010) adalah *Karo Jehé* yang berbeda dengan *Karo Gugung* yang bermukim di pegunungan. Meskipun berbeda karena alasan topografi, dan mungkin juga karena faktor agama, tetapi mereka memiliki satu asal usul yang sama yakni Karo.

Menyoal batas administratif, pada tahun 1950 muncul perdebatan menyoal penggabungan Karasidenan Tapanuli dan Karasidenan Sumatra

Timur dalam satu wilayah yang disebut Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1952, Tanah Karo dan Langkat digabung ke Provinsi Aceh dan sejak tahun 1956, ketiganya digabung ke Provinsi Sumatra Utara. Pembentukan Provinsi Aceh minus Tanah Karo dan Langkat dari Provinsi Sumatera Utara baru terjadi setelah keluarnya Undang-undang No 24 tahun 1956 tertanggal 7 Desember 1956 tentang *Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Aceh*. Sebelumnya, terbit Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1956 tertanggal 14 November 1956 tentang *Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara* (Damanik, 2018; Tim Penyusun, 1994).

Pada saat pembentukan Provinsi Sumatera Utara ini, bermunculan penolakan penggabungan kewilayahan. Tersebut seperti eks Karasidenan Tapanuli yang meminta agar mereka tetap dibentuk menjadi wilayah provinsi sendiri yang terpisah dari provinsi Sumatera Utara. Demikian halnya, Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Langkat, menolak digabung ke Provinsi Aceh. Kondisi demikian ini, membuat Gubernur Sumatra Utara yakni S.M. Amin mengalami goncangan internal karena harus menyelesaikan seluruh persoalan kewilayahan ini sesuai instruksi Presiden Soekarno. Dapat dipahami bila, penolakan-penolakan seperti itu terjadi karena adanya batas-batas administratif yang menganggangi batas kultural warisan Pemerintah Kolonial.

Karena itu, kelompok etnik sangat dinamis seperti disebut Nagata (1974) maupun van den Berghe (1967). Kelompok etnik adalah konstruksi sosial yang sengaja diperbuat (*a social construct or a choice to be made*) yang dibentuk berdasarkan proses kognisi (*cognitive process*) guna menentukan basis identitasnya. Identitas etnik pada masyarakat bukanlah sesuatu yang 'tunggal' tetapi cenderung 'jamak' (*not single but multiple ethnic identities*). Kaum *Konstruktivist* misalnya, memandang bahwa kelompok etnik adalah instrumen referensi personal (*personal reference*) berdasarkan kesamaan identitas, serta menjadi sumber motivasi dan perilaku (*motivation and behavior source*) pada kehidupan sosial warga etniknya. Sebagai konstruksi sosial, identitas etnik dapat mengalami perubahan dan mengadaptasi perubahan guna disesuaikan dengan identitas sosialnya. Dalam pandangan kombinitif, etnisitas dilihat sebagai radar sosial (*social radar*) yang

mengarahkan dan membimbing kelompok etnik guna memahami dunia sosialnya. Dunia sosial ini adalah kepentingan yang berintikan peluang sosial.

Sebagaimana disebut Perret (2010), munculnya label 'Melayu dan Batak' secara bersamaan pada abad ke-16, berangkat dari kenyataan bahwa label 'Batak' muncul sebagai pelengkap label 'Melayu'. Ruang 'Melayu' menganggap dirinya 'berbudaya' dan memasukkan semua orang bukan Melayu yang dipandang sebagai orang tak berpengetahuan, berperilaku kasar dan bahkan kanibal, di bawah istilah 'Batak' dengan konotasi merendahkan.

Di pedalaman inilah masyarakat Melayu memperoleh unsur-unsur yang diperlukan untuk terus bertahan seperti komoditas hutan, budak, pekerja dan juga istri-istri. Orang pedalaman yang 'me-Melayu-kan diri ini bertindak sebagai perantara antara populasi pedalaman dengan pedagang asing. Karena itu, istilah 'Batak dan Melayu' secara bersamaan muncul dari luar (ciptaan asing), yang kedua istilah itu menjadi identitas kabur (*evasive identity*). Orang pedalaman yang muncul di pesisir terutama para pedagang bertemu dengan pedagang Islam sejak abad ke-15 dan mengislamkan dirinya. Kemudian, karena identitas baru itu dianggap lebih '*civilized*', maka dikembangkan secara elegans untuk membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang *notabene* adalah asal usulnya juga. Pembeda utama yang dijadikan dasarnya adalah pemberian dan penegasan label 'Batak' pada masyarakat pedalaman sebagai masyarakat yang *uncivilized*.

Istilah 'Batak dan Melayu' ini menjadi sangat kabur apabila dipergunakan menunjuk populasi-populasi yang disebut dengan 'Batak dan Melayu' itu sendiri. Kekaburan di etnik Melayu menyoal tentang keanggotan etnik Melayu itu sendiri seperti di Deli, Langkat, Serdang, Begadai, Tebingtingi, Asahan, Batubara dan Labuhanbatu. Orang Melayu di daerah ini berasal dari orang Simalungun dan Karo yang sudah beralih ke agama Islam yang terjadi sebelum periode kolonialisme. Pada periode kolonialisme, identitas berdasar agama ini menjadi salah satu faktor penentuan batas-batas administratif yang dipandang sebagai batas etnik. Demikian halnya, konsep 'Batak' yang *evasive* ketika digunakan pada masyarakat yang disebut menjadi bagian dari identitas etnik itu. Kenyataannya, orang Simalungun, Mandailing,

Angkola, Karo, Pakpak dan sebenarnya juga Toba menolak pelabelan itu. Namun, terkecuali orang Toba yang menerima dan bangga dengan pelabelan itu karena adanya 'benefit' yang diperoleh dengan mengedepankan label itu pada kelompok etnik lainnya.

SIMPULAN

Bila merujuk Marsden (2008) adapun populasi kelompok etnik yang ia sebutkan pada lawatannya ke pantai barat Sumatra tahun 1774 adalah: Ankola (Angkola), Padambola (Padangbolak), Mandiling (Mandailing) dan Tubba (Toba) yang terdiri dari Silindong (Silindung), Butar dan Sinkel (Singkil). Ia juga menyebut Carrow (Karo) yang berbeda dengan Tubba (Toba). Sementara Anderson pada lawatannya di pantai timur Sumatra tahun 1823 menyebut populasi kelompok etnik seperti: Mandiling (Mandailing), Kataran dari Semilongan, Pappak (Pakpak), Tubba (Toba), Karau-karau (Karo), Kapik (mungkin Gayo) dan Alas. Pada akhirnya, cara-cara yang dipergunakan seperti Marsden (2008) dan Anderson (1971) dan lain-lain dan tentu saja yang paling mutakhir seperti Viner (1980) dan Perret (2010) patut dipertimbangkan untuk menyebutkan kelompok-kelompok etnik di Sumatera Utara, ditambah etnik seperti 'orang Lubu' yang sama sekali tidak pernah disebut dalam literatur antropologi. Atas dasar itu, patut dipertanyakan asal muasal penyeragaman etnik Batak dan Melayu seperti dalam literatur antropologi itu, karena memang pada dasarnya sulit diseragamkan. Pada akhirnya, penelitian etnografi tentang kelompok etnik di Sumatera Utara masih dibutuhkan dengan melibatkan lintas disiplin seperti sejarah, antropologi, arkeologi dan juga linguistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adatrechtbundels. (1919). Serie A, No. 25, Maret 1916-1 Mei 1919.
- Anderson. J. (1971). *Mission to the East Coast of Sumatra in 1832*. London, New York: Oxford University Press.
- Agustono. B. (2010). *Rekonstruksi Identitas Etnik: Sejarah Sosial-Politik Orang Pakpak Di Sumatera Utara (1958-2003)*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Aritonang. J. (1988). *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak: Suatu Telaah Historis-Teologis atas Perjumpaan Orang Batak dengan Zendeling*

- (khususnya RMG) di Bidang Pendidikan, 1861-1940. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Barth, F. (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Boston: Little brown.
- Bangun, P. (1980). *Kebudayaan Batak, dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Koenjtaraningrat (ed). Jakarta: Balai Pustaka.
- Barned, D.J. (1912). *50 Jahre Batafmission in Sumatra*. Berlin: Verlag von Martin Warneck.
- Berutu, L. (1994). *Upacara Menanda Tahun Pada Masyarakat Pakpak di Sumatera Utara*. Tesis Magister. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Butar-butur, M.A.B. & Damanik, U.H. (1984). *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Siladang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Breman, J. (1992). *Menjinakkan Sang Kuli*. Jakarta: Grafiti.
- Bruner, E.M. (1961). Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatera. *American Anthropologist*, 66, pp. 508-521.
- Brahmoputro. (1981). *Karo dari Zaman ke Zaman*. Medan. Ulih Saber
- Castles, L. (2002). *Kehidupan Politik Suatu Karesidenan di Sumatera: Tapanuli, 1915-1940*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cunningham, C.E. (1958). *The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatera*. New Heaven: Yale University cultural report series.
- Clauss, W. (1982). *Economic and Social Change among the Sima/ungun Batak of North Sumatera*. Saarbrücken fortlauderdale: Verlag Breitenbach Publishers.
- Damanik, E.L. (2018). *Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir Kebudayaan lewat Foto*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, E.L. (2017). *Agama, perubahan sosial dan identitas etnik: Moralitas agama dan kultural di Simalungun*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, E.L. (2017). *Rumor Kanibal, Menolak Batak dan Jejak Perdagangan: Etnohistori Sumatera bagian utara*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik, E.L. (2017). *Sumatra dan Kabar-Kabar Kanibalisme, dalam Sumatera Silang Budaya Kontestasi Nilai-Nilai Historis, Arkeologis, dan Antropologis serta Upaya Pelestarian Cagar Budaya*. Sri Sugiharta (ed). Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat.
- Damanik, E.L. (2016). *Kontestasi Identitas Etnik pada Politik Lokal: Studi tentang Makna Etnisitas di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*. Disertasi Doktor. Surabaya: Program Studi Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Damanik, E.L. (2016). *Kisah dari Deli: Historisitas, Pluralitas dan Modernitas Kota Medan, 1870-1942*. Medan: Simetri Institute.
- Dasuha, J. dan Sinaga, M.L. (2003). *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus tahun Injil di Simalungun, 1903-2003*. Pamatangsiantar: Kolportase GKPS.
- De Vos, G. and Ross, L.R. (eds.). (1967). *Ethnic Identity: Cultural Continuities and Change*. Palo Alto: Mayfield Publishing.
- Geertz, C. (1963). The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States. In *Old Societies and New States*. C. Geertz (ed.). New York: The Free Press.
- Gultom, D.R.M. (1992). *Dalihan Natolu: Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda.
- Glazer, N. and Moynihan, D.P. (1963). *Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York*. Massachusetts: The MIT Press.
- Hale, H.E. (2008). *The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harahap, E.S. (1960). *Perihal Bangso Batak*. Djakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- Hasselgren, J. (2008). *Batak Toba di Medan: Perkembangan Identitas Etnoreligius Batak Toba di Medan, 1912-1965*. Medan: Bina Media Perintis.
- Hirouse, M. (2009). The Role of Local Informants in the Making of the Image of 'Cannibalism' in North Sumatera. In *From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra*. Dominik Bonatz, J. Miksic, J. David Neidel, and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds.). New Castels: Cambridge Scholars Publishing.
- Hutagalung, W.M. (1991). *Pustaka Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*. Jakarta: Tulus Jaya.
- Hutauruk, J.R. (1993). *Kemandirian Gereja: Penelitian Sistematis Tentang Gerakan Kemandirian Gereja di Sumatera Utara dalam Kancah pergolakan Kolonialisme dan Gerakan Kebangsaan Indonesia, 1899-1942*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Husny, T.M.L. (1978). *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jansen, A.D. (2003). *Gonrang Simalungun: Struktur dan Fungsinya dalam Masyarakat Simalungun*. Medan: Bina Media Perintis.
- Joustra, M. (1909). *De islam in de Bataklanden*. Leiden. S.C. van Doesburgh. Uitgave van het Bataksch Institut No. 2.

- Joustra, M. (1910). *Batakspiegel*. Leiden. S.C. van Doesburgh. Uitgave van het Bataksch Institut No. 3.
- Kipp, R.S. and Kipp, R.D. (1983). *Beyond Samosir: Recent Studies of the Batak Peoples of Sumatra*. Ohio: Center for International Studies, Southeast Asia Program.
- Kroesen. J.A. (1897). Eene reis door de landschappen Tanjoeng Kassau, Siantar en Tanah Jawa. *Tidsschrift voor indische Taal-, Land-en Volkenkunde*.
- Kreemer, J. (1912). *De Loeboes in Mandailing*.
- Kozok, U. (1999). *Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak*. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, EFEO Jakarta.
- Langenberg, M.v. (1977). North Sumatra under Dutch colonial rule: Aspects of Structural change. *Review of Indonesian and Malayan Affairs*.11.
- Liddle, R.W. (1970). *Ethnicity, Party, and National Integration: an Indonesian Case Study*. New Heaven: Yale University Press.
- Loeb, E.M. (1981). *Sumatra: Its History and the People*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Lumbantobing, A. (1957). *Sedjarah Sisingamaradja I-XII*. Medan: Firman Sihombing.
- Meerdwaldt, J.H. (1894). Anteeeningen betreffende de Bataklanden. *Tidsschrift voor indische Taal-, Land-en Volkenkunde*
- Miksic, J.N. (1979). *Archaeology, Trade and Society ion Northeast Sumatra*. Ph.D Thesis, Cornell University, Ithaca.
- Milner. A.C. (1978). *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*. Tucson: The University of Arizona Press.
- Nagata. Judith, 1981. In defense of ethnic boundaries: the changing myths and charters of Malay Identity. In *Ethnic Change*. C. Keyes (ed.). Washington.
- Naroll, R. (1964). Ethnics Unit Identification. *Current Anthropology*. Vol. V. no.4
- Oudemans, R. (1973). *Simalungun Agriculture: Some Ethnographic Aspects of Dualism in North Sumatra Development*. College Park: University of Maryland.
- Parkin, H. (1978). *Batak Fruit of Hindu Thought*. Madras: The Christian Literature Society.
- Pardede, J. (1975). *Die Batakchristen auf Nord-Sumatra und Ihr Verhaltnis zu den Muslimen*. Disertasi. Johannes Gutenberg Universitat.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timurlaut*. Saraswati Wardhany (alihbahasa). Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, EFEO-Jakarta, Forum Jakarta-Paris dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta.
- Pelzer, K.J. (1985). *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur, 1863-1947*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pelly, U. (2015). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minagkabau dan Mandailing di Kota Medan*. Medan: Unimed Press dan Casa Mesra.
- Penny. D. H. (1964). *The Transition from Subsistence to Commercial Family Farming in North Sumatra*. Ph.D. thesis Ithaca: Cornell University.
- Pedersen, P.B. (1969). *Batak Blood and Protestant Soul*. Michigan: Wiliam B. Erdmans Publishing.
- Pires, T. (1944). *The Suma Oriental of Tome Pires*. Armando Cortesao (ed and trans.). London: Hakluyt Society.
- Pinto, F.M. (1991). *Peregrination*. Viale. R ,(translator), Paris: La Difference.
- Polo, M. (1958). *Cannibals and the Kings: Northern Sumatra in 1290s*. Ronald Latham (trans.). Harmondsworth: Penguin Books.
- Reid, A. (2009). Is there Batak History?. In *From Distant Tale: Achaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatera*. Dominik Bonatz, John Norman Miksic, J. David Neidel, and Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds). New Castles: Cambridge Scholars Publishing.
- Reid, A. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Reid, A. (ed.). (1995). *Witnesses to Sumatra: A Travellers Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Royce, A.P. (1982). *Ethnic Identity: Strategies of Diversity*. Bloomington: Indiana University Press.
- Said, M. (1961). *Aceh Sepanjang Abad, Jilid-I*. Medan: Waspada.
- Sidjabat, W.B. (1982). *Ahu si Singamangaraja*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Siahaan, N. (1964). *Sedjarah Kebudayaan Batak: Suatu Studi tentang Suku Batak*. Medan: CV. Napitupulu&Sons.
- Sinar, T.L. (1986). *Sari Sedjarah Serdang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2 Jilid).
- Sinar, T.L. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatra Timur*. Medan: Sinar Manajemen.
- Sinar. T.S. dan Tou, A.B. (2008). The Indonesia Regional Language: Siladang Language. *International Conference on Moribund Languages and Cultures*. Kuala Lumpur: Faculty of Languages and Linguistics. University of Malaya Kuala Lumpur and Persatuan Bahasa Moden Malaysia.14-16 October 2008.
- Singarimbun, M. (1975). *Kinship, Descent and Alliance among the Karo Batak*. Los Angeles: University of Carolina Press.

- Simanjuntak, B.A. (2002). *Konflik Status dan Kekuasaan orang Batak Toba*. Yogyakarta: Jendela.
- Simanjuntak, B.S. (1977). *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar.
- Situmorang, S. (2004). *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Stoler, A.L. (2006). *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Deli, 1863-1956*. Yogyakarta: Karsa.
- Smith, A.D. (1982). Chosen People: Why Ethnic Group Survive? In, *Ethnic and Racial Studies*, 2.2. Routledge: London.
- Tarigan, H.G. (1974). *Struktur Sosial dan Organisasi Sosial Masyarakat Simalungun*. Bandung: Jurusan bahasa dan sastra IKIP Bandung
- Tarigan, H.G. (1975). *Morfologi bahasa Simalungun*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun. (1994). *Sejarah Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Kodiklat Pemda Sumatera Utara.
- Van den Berghe, P.L. (1967). *Race and Racism: A Comparative Perspective*. New York: Jhon Willey and Sons, Inc.
- Vergouwen. J.C, (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Viner. A.C. (1980). The Changing Batak. *Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 52: 84-112.
- Vorhoeve, P. (1929). *Overzicht van de Volksverhalen der Bataks*. Vlissingen: van de Velde.
- Vorhoeve, P. (1955). *Critical survey of studies on the languages of Sumatra*. S'Gravenhage: M. Nijhoff.
- Westenberg. C.J. (1891). Nota over de onafhankelijke Bataklanden. *Tidsschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde*.
- Westenberg. C.J.. (1897). Aanteekingen omtrent de godsdienstige begrippen der Karo-Bataks. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van de Koninklijk Instituut*.
- Wiradyana, K. (2014). *Identifikasi dan Penelusuran Jejak Perdaban Batak Toba di Kabupaten Samosir tahun 2014*. Samosir: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir kerjasama dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara.